

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 10 Oktober2020

SILVIA ANGELA
NIM : 161120118

ABSTRAK

Nama: Silvia Angela NIM: 161120118 Judul Skripsi : Mekanisme Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota berwenang mengatur sendiri urusan pemerintahannya sendiri berdasarkan asas otonomi dan pembantuan. Namun dengan adanya hal tersebut akan menimbulkan permasalahan lain, seperti adanya peraturan perundang-undangan sektoral yang belum sesuai dengan undang-undang otonomi daerah. Akibatnya terjadi tarik menarik kewenangan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Perumusan masalah dalam Penelitian ini adalah : 1). Bagaimana mekanisme hubungan kewenangan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014? 2). Bagaimana pembagian kewenangan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Tujuan Penelitian: 1). Untuk mengetahui bagaimana mekanisme hubungan kewenangan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah. 2). Untuk mengetahui bagaimana pembagian kewenangan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif dengan cara melakukan studi kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data menggunakan sumber primer yaitu peraturan perundang-undangan dan sumber sekunder yang di peroleh melalui media prantara berupa catatan, buku-buku teks, jurnal, artikel, dan berita di internet, adapun analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif kemudian di sajikan dalam bentuk deskriptif.

Kesimpulan dari penelitian ini: 1) Mekanisme hubungan kewenangan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah melalui delegasi yakni pelimpahan wewenang dari satu badan/pejabat kepada badan/pejabat lainnya walaupun pada dasarnya antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan yang ditentukan oleh undang-undang sebagai kewenangan masing-masing pemerintah. 2) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan pembagian urusan kewenangan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dilihat dari dampak dan manfaat yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Jika dampak yang ditimbulkan bersifat daerah lokal maka menjadi urusan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sedangkan jika dampak atau manfaatnya lintas Kabupaten/Kota maka menjadi urusan Pemerintahan Provinsi.



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jl. Jend. Sudirman No. 30 Serang 42118 telp.(0254) 2000323 Fax.(0254) 200022

Nomor : Nota Dinas
Lamp : 1 (satu) Eksemplar
Hal : **Pengajuan Ujian Munaqasyah
a.n. SILVIA ANGELA
NIM :161120118**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
UIN SMH Banten
di
Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudari Silvia Angela, NIM:161120118, Judul Skripsi: **Mekanisme Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah** telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera di munaqasyahkan.

Demikian, atas segala perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 10 September 2020

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dra. Denna Ritonga, M.S.I
NIP. 19670402 199103 1003

Nita Anggraeni, M.Hum
NIP. 19820606 201101 2 014

**MEKANISME HUBUNGAN KEWENANGAN ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN
DAERAH**

Oleh:

SILVIA ANGELA
NIM. 161120118

Menyetujui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dra. Denna Ritonga, M.S.I
NIP. 19670402 199103 1003

Nita Anggraeni, M.Hum
NIP. 19820606 201101 2 014

Mengetahui :

Dekan
Fakultas Syariah,

Ketua
Jurusan Hukum Tata Negara

Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.
NIP. 19591119 199103 1 003

Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.
NIP. 19780623 200604 1002

Persembahan

Skripsi ini penulis persembahkan untuk ayahanda tercinta bapak H. Sabiran dan ibu tercinta ibu Hj. Mumum Maemunah, yang bagi penulis merupakan penyemangat utama dalam pembuatan skripsi, yang tidak lelah selalu mendoakan dan tidak lelah mencari Rizky demi pendidikan anaknya.

Penulis juga persembahkan skripsi ini untuk kakak-kakak ku Santi Fulistia yang tidak berhenti memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, tak lupa untuk keluarga besarku dan sahabat-sahabat yang terus memberi semangat untuk penulis.

MOTTO

قَالَتْ إِحَدَهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ^ص إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ

الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

"Karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

(QS. Al-Qashash : 26)

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Silvia Angela lahir di Lebak pada tanggal 12 Juni 1997, Putri dari Bapak H. Sabiran dan Ibu hj. Mumun Maemunah, anak bungsu dari tiga bersaudara. Alamat penulis Kp. Sindang Sari RT/RW: 005/01 Desa Cipedang Kec. Wanasalam Kab. Lebak Banten.

Adapun pendidikan Formal yang sudah penulis tempuh yaitu SDN 02 Cipedang pada tahun 2010, SMPN 01 Wanasalam pada tahun 2013. Dan SMA Negeri 1 Malingping pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis Alhamdulillah dapat menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT, serta doa dan usaha yang tak pernah putus, alhamdulillah pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Mekanisme Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”**. Penulis berharap dengan adanya skripsi ini dapat membawa manfaat dan berguna khususnya bagi penulis, pembaca dan masyarakat pada umumnya

Penulisan skripsi ini dapat terwujud berkat bantuan dan motivasi dari semua pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman., M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan Universitas Islam Negeri Sulatan Maulana Hasanuddin lebih baik dan maju lagi.
2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag., Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuannya kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.

3. Bapak Dr. H. Muhammad Ishom, M.A., Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. E. Zaenal Mutaqqin, M.H., M.A., Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah, yang telah memberikan persetujuan serta bimbingan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
5. Ibu Dra. Denna Ritonga, M.S.I Pembimbing I, dan Ibu Nita Anggraeni, M.Hum. Pembimbing II yang telah sabar membimbing dan memberikan arahan serta motivasinya kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Akademik dan Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini.
7. Kepada kedua orang tua dan kakak-kakak yang selalu mendoakan dan memberi motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Keluarga Besar H. Jaya dan Keluarga Besar H. Suganda yang selalu memberikan doa dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada teman Ayi Hayatun Nufus dan Elvi Tamala yang dari awal masuk universitas, terimakasih telah kebersamaan selama kita mencari ilmu, selalu memberi semangat, sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini sampai selesai.
10. Teman-Teman seperjuangan Jurusan Hukum Tata Negara angkatan 2016 terkhusus HTN-D yang selalu memberikan

semangat tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sampai selesai.

11. Kepada teman-teman, Siti Musfiroh, Wihdah Junaidiyati, Siti Maftuha, Sentia Febriyanti dan Eni Listaini yang selalu memberikan semangat tiada henti kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada Keluarga Mahasiswa Lebak (KUMALA) terkhusus angkatan KNPI 2016, terimakasih atas semua motivasi dan doa yang selalu di berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada Kantin Sakinah, Es gula batu, Mas Nikno dan kawan kawan terimakasih Terimakasih sudah menjadi bagian dari hidup penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca yang sifatnya membangun merupakan apresiasi dan bahan untuk menjadikan sebuah peningkatan dalam penulisan skripsi ini, penulis berharap semoga apa yang telah penulis berikan melalui karya ilmiah ini bisa bermanfaat dan berguna khususnya bagi penulis, pembaca dan masyarakat pada umumnya sebagai khasanah ilmu pengetahuan. Dan semoga kebaikan bapak dan ibu dosen beserta jajaran dan teman-teman yang telah mensupport saya diberikan belasan oleh Allah SWT. Amin.

Serang, 10 Oktober 2020

Penulis

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK.....	ii
NOTA DINAS	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO.....	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Fokus Penelitian.....	12
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	13
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan	13
G. Kerangka Pemikiran.....	16
H. Metode Penelitan.....	19
I. Sistematika Penulisan	21

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum tentang Kewenangan.....	23
1. Definisi Kewenangan.....	23
B. Sifat dan Sumber Kewenangan	27
1. Sifat Kewenangan	27
2. Sumber Kewenangan	32
C. Pembatasan Kewenangan	40

BAB III KONSEP DASAR PEMERINTAHAN DAERAH

A. Definisi Pemerintahan.....	43
B. Definisi Pemerintahan Daerah	45
C. Dasar Pembentukan Pemerintahan Daerah	53
D. Sistem Rumah Tangga Daerah.....	58
E. Sistem Administrasi Daerah.....	60
F. Kewenangan Pemerintah Daerah.....	64

BAB IV Mekanisme Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

A. Mekanisme Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014	79
--	----

B. Pembagian Urusan Kewenangan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014	87
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	101
B. Saran-saran.....	102

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN